

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini penulis akan memberikan uraian tentang teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap objek penelitian yang telah dikemukakan di awal. Adapun beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah konsep Keamanan Nasional, Teori Pembangunan Perdamaian (*Peacebuilding*), teori kebutuhan dasar manusia dan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*). Berikut merupakan penjabaran dan penjelasan terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan sebuah konsep yang menjelaskan dan memberikan sebuah perspektif tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga keamanan dan kedamaian di wilayahnya. Sebagai sebuah usaha keamanan nasional adalah sebuah objek ketercapaian yang diinginkan serta dicita-citakan oleh seluruh warga negara untuk dapat diciptakan sepanjang negara masih berdiri. Wahyono (2003) menjelaskan bahwa konsep keamanan nasional merupakan sebuah tujuan dalam rangka menciptakan sebuah kondisi yang aman dan dicapai dengan melibatkan berbagai unsur yang dimiliki oleh negara. Hal ini juga ditambahkan oleh Darmono (2010) yang menyebutkan bahwa keamanan nasional dapat dilihat dalam dua sisi, yakni sebagai kondisi dan fungsi. Sebagai sebuah kondisi, keamanan nasional merupakan sebuah kondisi yang aman dan mampu melindungi segenap komponen bangsa untuk hidup dengan tenang. Kemudian, sebagai sebuah fungsi, keamanan nasional merupakan salah satu

fungsi yang dimiliki negara dalam rangka fungsinya sebagai penciptaan kondisi yang aman.

Dalam melihat konsep kewananan nasional, terdapat beberapa konsepsi yang dapat dijadikan rujukan. Pertama adalah berdasarkan tingkatan analisis, dimana Buzan (1989) membagi kewananan nasional menjadi tiga level yakni individual, nasional, dan internasional. Selain itu, dalam kewananan nasional juga dapat dilihat dari dimensi yang ada di dalamnya. Konsep dimensi kewananan nasional menurut Buzan (2008) dibagi menjadi beberapa hal diantaranya adalah *the military security, the political security, the economic security, societal security, dan environment security*, serta *human security*. Kelima dimensi di awal merupakan dimensi yang pertama kali dirancang sebelum adanya perluasan dimensi dengan menyertakan konsep *human security* atau kewananan insani. Dimensi kewananan insani merupakan sebuah jawaban atas sudut pandang hak asasi manusia yang dominan dan menjadi perhatian utama dalam pembahasan soal kewananan beberapa tahun terakhir (A'raf, 2015).

Dimensi kewananan militer memberikan fokus kewananan pada bagaimana negara melakukan pengelolaan terhadap kapabilitas dan kekuatan militer yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan baik secara ofensif ataupun secara defensif. Selanjutnya, kewananan politik merupakan dimensi kewananan nasional yang berusaha untuk memberikan kondisi yang stabil terhadap ideologi, sistem, dan organisasi negara dalam rangka tugas dan fungsi negara untuk memastikan jalannya roda pemerintahan. Dimensi ketiga adalah kewananan ekonomi yang menjadikan faktor ekonomi sebagai fokus utama yang berusaha untuk dijaga stabilitas dan aksestabilitasnya. Dimensi ekonomi juga berusaha untuk memberikan pemerataan terhadap sumber-sumber ekonomi kepada setiap warga negara. Dimensi selanjutnya merupakan kewananan sosial yang berusaha untuk memastikan pola-pola kemasyarakatan

untuk tetap tumbuh dan berkembang, serta bertahan dari perubahan-perubahan yang saat ini tengah gencar terjadi. Kelima, adalah dimensi keamanan lingkungan dimana kelestarian dan pemeliharaan lingkungan menjadi faktor yang benar-benar dijaga dalam konsep keamanan nasional. Terakhir, dimensi keamanan insani merupakan dimensi yang mengedepankan kepentingan kesejahteraan dan pemeliharaan atas hak-hak manusia dalam setiap usaha penciptaan keamanan yang dilakukan.

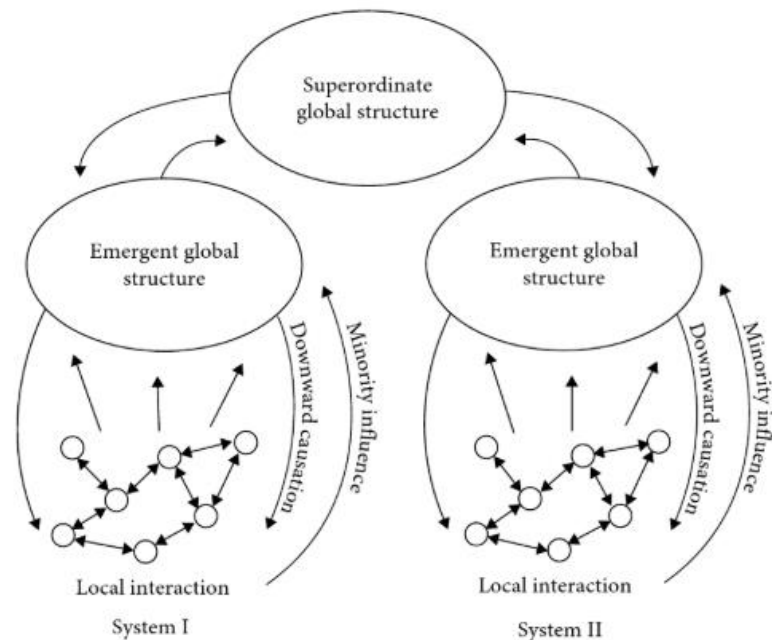
Perspektif keamanan nasional dalam penelitian ini menjadi salah satu perspektif yang penting karena akan menjadi sebuah ukuran pokok atas objek penelitian. Pendekatan pembangunan di Papua merupakan salah satu usaha dalam menciptakan keamanan nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu dilihat baik dalam tingkatan analisis keamanan nasional maupun dimensi-dimensi yang menyertai perspektif tersebut. Sebagai sebuah usaha yang dilakukan terus menerus, perspektif keamanan nasional juga dapat memberikan sebuah evaluasi dan saran-saran konstruktif untuk menyempurnakan strategi pengelolaan masalah yang terjadi di Papua selama ini. Sehingga, diharapkan strategi yang digunakan nantinya akan benar-benar memberi dampak signifikan baik pada masyarakat Papua maupun bagi keamanan nasional.

2.1.2 Teori Pembangunan Perdamaian

Konsep pembangunan perdamaian atau biasa dikenal dengan *peacebuilding* merupakan sebuah bahasan mengenai kumpulan usaha untuk melakukan pembinaan suatu kondisi damai dengan menghindari adanya kekerasan. Konsep pembangunan perdamaian adalah sebuah kajian yang hadir dan termuat dalam agenda Perdamaian yang dicanangkan oleh PBB pada tahun 1996 (Boutros, 1996). Di dalam kajian ini perdamaian didapatkan melalui serangkaian usaha baik yang sistematis maupun berasal dari inisiatif

yang temporer serta memiliki beberapa tipe dalam penanganannya. Usaha-usaha dalam mendapatkan perdamaian ini kemudian dikenal dengan istilah intervensi (*conflict intervation*).

Menurut Ginty dan Richmond (2013) pembangunan perdamaian merupakan agenda yang marak dilakukan pada satu dekade kebelakang dengan tujuan untuk menghadirkan perdamaian yang lebih awet. Oleh karena itu, dibutuhkan cara-cara baru dalam melahirkan perdamaian ketimbang hanya melakukan cara lama seperti intervensi militer berlebihan dan kekerasan sebagai jala menuju damai. Karakteristik upaya pembangunan perdamaian biasanya dibagi menjadi dua macam berdasarkan oleh inisiator dari proses tersebut. Dalam pembangunan perdamaian, didalamnya juga terdapat interaksi yang sistemik dan melibatkan beberapa konsep. Hal ini digambarkan oleh Nadler dkk (2008) dalam ilustrasi sebagai berikut.



Gambar 1.1 ilustrasi interaktif pembangunan perdamaian

Pada ilustrasi di atas, dapat tergambar bahwa proses pembangunan perdamaian merupakan satu kegiatan yang terstruktur dan harus dilakukan secara simultan. Selain itu, proses-proses pembangunan perdamaian juga sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungan strategis atau geopolitik. Sehingga propaganda adalah salah satu upaya yang seringkali mengganggu jalannya proses perdamaian.

Penjelasan dari Charbonneau dan Parent (2013) memberikan perspektif atas pembagian inisiatif dari *peacebuilding* dapat dibagi menjadi dua yakni pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Kedua pendekatan ini merupakan penjelasan yang cukup komprehensif dan dapat menjadi jembatan dalam memahami usaha yang dilakukan pada saat pembangunan perdamaian. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba memberikan analisis dari perspektif pembangunan perdamaian atas usaha meredakan konflik di Papua yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Koreksi dan evaluasi atas pendekatan yang dilakukan dapat dilakukan dengan melihat pendekatan pemerintah atas persoalan di Papua agar kemudian pendekatan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak.

Top-down merupakan pendekatan dalam pembangunan perdamaian yang menekankan pada inisiasi pemerintah atau otoritas atas dalam rangka pembangunan perdamaian yang dilakukan. Pendekatan *top-down* dijelaskan oleh Hancock (2008) sebagai sebuah atribut dalam penanganan konflik yang dilihat sebagai sebuah model penyelesaian konflik yang kebanyakan dimulai dari inisiatif pemimpin. Dalam contoh yang ditemui, penyelesaian secara *top-down* telah diterapkan pada beberapa kasus seperti perdamaian yang dilakukan di Irlandia Utara. Pada kasus yang terjadi di Irlandia Utara, penyelesaian konflik dan kesepakatan perdamaian dimulai dengan adanya perjanjian dan upaya yang dimulai oleh para tokoh masyarakat (Neuheiser dan Wolff, 2002). Adanya peran tokoh masyarakat dan pemimpin di satu wilayah

menjadikan penanganan konflik menjadi tersentralisir sehingga apabila terjadi persetujuan dari semua pihak, konflik akan lebih mudah selesai. Namun kekuarangan yang ada adalah mengecilkan inisiatif dan adanya usaha yang dilakukan dari bawah oleh masyarakat sehingga banyak usaha yang dilakukan ini menjadi terabaikan meskipun memiliki kelebihan masing-masing (Auteserre, 2018).

Berbeda dengan top-down yang berasal dari inisiatif kepala pemerintahan, pendekatan bottom up mencoba untuk memberikan ruang bagi inisiatif masyarakat bawah dalam merumuskan penyelesaian konflik. Ginty (2014) menjelaskan bahwa bottom up merupakan rangkaian usaha dalam menyelesaikan konflik dengan mengaris bawahi adanya usaha dari masyarakat sebagai motor penggerak perdamaian. Istilah *local agency* dalam konsep bottom up dikenal dan sangat penting untuk dicari, karena persoalan konflik dalam pandangan bottom up harus diselesaikan dengan keterlibatan masyarakat. Richmond (2012) mengarisbawahi bahwa penyelesaian konflik tidak akan bertahan begitu lama jika hanya dilakukan oleh segelintir orang atau institusi tertentu. Demikian halnya dengan contoh kasus yang terjadi di Timur Tengah, seperti halnya disampaikan oleh Yaalon (2017) bahwa pendekatan bottom up terbukti memberikan kesepakatan damai yang lebih permanen dikarenakan pemerintah lokal yang cenderung tidak dapat diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa baik top-down, maupun bottom up merupakan pilihan yang sangat tergantung dari dimana dan bagaimana konteks masyarakat berada.

Dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya kedua pendekatan baik top-down maupun bottom-up merupakan serangkaian pilihan yang dapat dipilih dalam menyelesaikan konflik. Merujuk kepada hal ini, penelitian ini menjadi sangat relevan apabila memberikan sudut pandang mengenai pembangunan perdamaian dalam hal ini kedua karakteristik tersebut di atas.

Sudut pandang dalam menjelaskan adanya pendekatan perdamaian yang telah dilakukan dan evaluasi terhadapnya adalah poin-poin yang penting untuk menjadikan pendekatan perdamaian di Papua mejadi lebih baik kedepannya. Menjadi harapan bersama dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih baik dan menghindarkan konflik secara berkepanjangan terjadi di Papua.

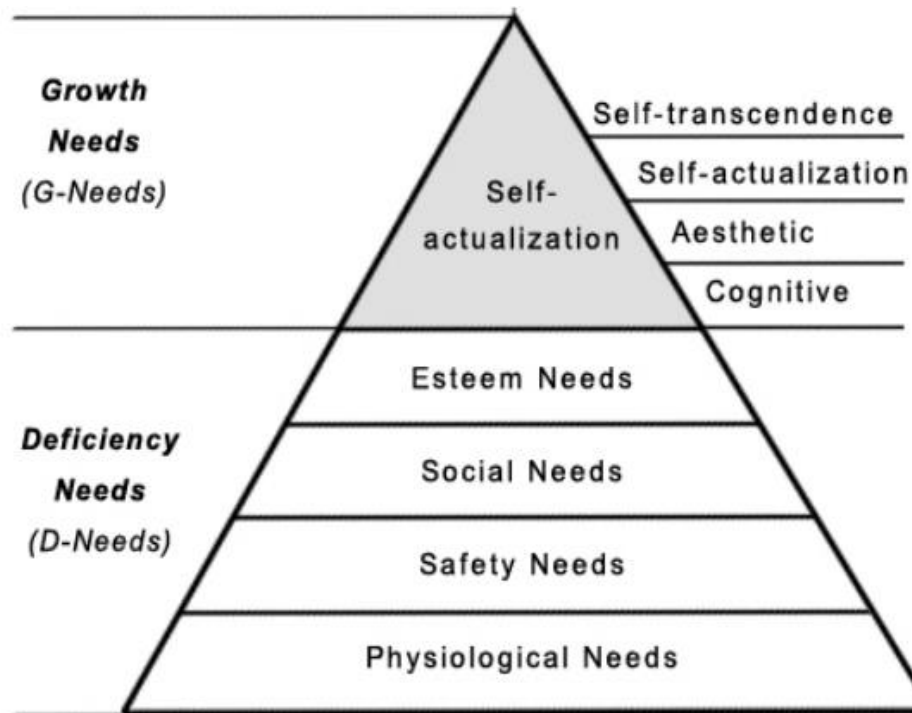
2.1.3 Teori Kebutuhan Dasar Manusia

Teori ketiga yang akan digunakan dalam membahas penelitian ini adalah teori kebutuhan dasar manusia. Penjelasan singkat tentang kebutuhan dasar manusia adalah satu pendekatan yang menjelaskan tentang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dalam menunjang kehidupannya. Apabila kebuthan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka ada kemungkinan manusia atau kelompok tersebut dapat melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Maslow (2003) menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan satu perangkat kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupannya. perangkat kebutuhan ini digambarkan oleh Maslow dengan menggunakan piramida yang membagi setiap klaser kebutuhan dalam kelompok prioritas.

Secara umum Human Needs Theory menjelaskan berbagai hal umum yang dirangkum kedalam kelas-kelas kebutuhan. Kebutuhan ini sangat penting untuk dipenuhi manusia karena berpengaruh besar kepada kehidupan dan motivasi untuk melakukan sesuatu. Teori kebutuhan dasar ini pertama kali diperkenalkan oleh Maslow di tahun 1960 an dan dianggap sebagai revolusi atas dunia pembelajaran karena mampu memberikan analisis terhadap motivasi manusia (McLeod, 2007). Mekanisme motivasi manusia dijelaskan dengan asumsi bahwa manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Ketika manusia berhenti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka manusa tersebut dapat mati. Oleh karena itu dalam penjelasan yang dikembangkan

oleh teori ini bermuara pada pertanyaan apakah manusia baik secara individu sudah terpenuhi kebutuhannya. Berikut merupakan piramida kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan oleh Maslow dalam teori kebutuhan dasar manusia.

Gambar 2.1 Hirarki Kebutuhan Maslow



(Maslow, 2013)

Dari gambar di atas dapat memberikan penjelasan secara lebih jelas tentang rentetan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi klaster-klaster yang dikelompokkan dalam enam kelompok besar. Beberapa pembagian kelompok kebutuhan tersebut antara lain. (1) *Physiological needs* atau kebutuhan fisiologi yang mencakup kebutuhan seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lain yang menyangkut fisiologis manusia. (2) *Safety needs* merupakan kebutuhan akan rasa aman dan tidak merasa terancam baik secara fisik maupun psikis. (3) *Social needs*

atau kebutuhan sosial, merupakan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan rasa dimiliki maupun memiliki kelompok sosial. (4) *Esteem needs* merupakan kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan atas apa yang telah dilakukan ataupun capaian yang telah diraih. (6) *Self actualization* atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri baik secara kognitif, afektif, maupun secara transendental. Semua kebutuhan ini merupakan rangkaian kebutuhan dasar manusia yang berupa kelompok untuk dapat dipenuhi semuanya ataupun sebagian sesuai kebutuhan tiap individu atau kelompok.

Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan mendorong manusia untuk berperilaku yang tidak sepatutnya. Hal-hal seperti konflik dan kekerasan banyak terjadi dengan alasan adanya kebutuhan yang tidak tercapai atau terpenuhi. Gagasan bahwa konflik sering terjadi dikarenakan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan, dikemukakan oleh Danesh (2011) yang menjelaskan bahwa kebutuhan dasar memegang peranan sentral atas ketahanan masyarakat terhadap konflik. Pendapat ini penguatan atas pendapat yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Roy (1990) yang menjelaskan adanya korelasi yang sangat kuat atas konflik akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu teori ini sangat penting dan identik dengan penyelesaian konflik, terutama pada saat asesmen akar konflik.

Penerapan teori kebutuhan dasar manusia dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan adanya kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi dan mencoba merumuskan konsep untuk memenuhi kebutuhan tersebut. sehingga diharapkan dengan adanya kecukupan kebutuhan, maka masyarakat di Papua sesuai konteks penelitian yang tengah diusung akan jauh dari konflik sosial. Selain itu teori kebutuhan dasar manusia juga dapat memberikan masukan dan rumusan untuk dapat menyempurnakan pembangunan yang saat ini tengah

dijalankan pemerintah di tanah Papua. sehingga pembangunan berkelanjutan yang dilakukan akan benar-benar memenuhi kaidah kebutuhan dasar manusia khususnya kebutuhan masyarakat Papua.

2.1.4 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

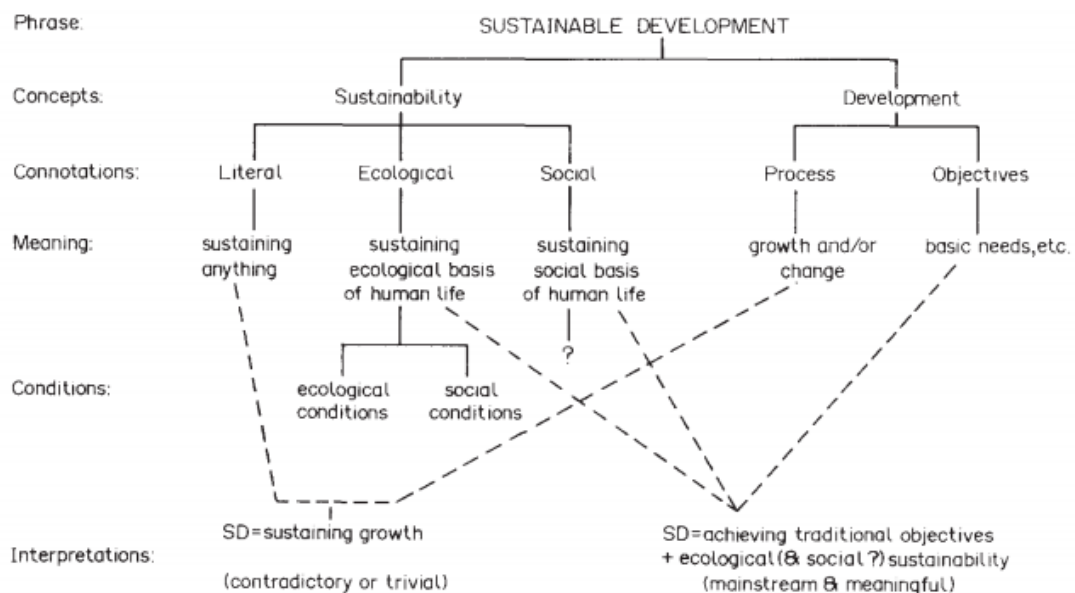
Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* (SD) adalah konsep pembangunan yang tengah diusung oleh dunia internasional dalam pembangunan di negaranya masing-masing. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development pada tahun 1987 (Brundtland dkk., 1987). Pada awalnya konsep ini dirancang untuk mengembangkan tujuan bersama pembangunan yakni pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan di masa yang akan datang. Dalam konsep SD terdapat dua frasa utama yang menjadi kunci dalam pembahasannya yakni pembangunan dan berkelanjutan. Kedua kata kunci inilah yang menjadi landasan dalam terjemahan program yang diusung oleh konsep SD. Di Indonesia sendiri, konsep SD dikemukakan pertama kali oleh Emil Salim yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri lingkungan hidup.

Pada dasarnya konsep SD bertujuan untuk memberikan road map pembangunan dengan lebih menjunjung visi kedepan dan berwawasan lingkungan. Salim (2005) menjelaskan konsep kunci SD bertumpu atas adanya dua hal yakni kebutuhan dan keterbatasan. Kebutuhan berarti adanya kebutuhan dari banyak lapisan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses dan pelayanan yang baik, khususnya masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Kemudian konsep keterbatasan yang mengarisbawahi bahwa setiap negara dan generasi memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, konsep SD diharapkan dapat

menghindarkan ketertinggalan yang selama ini ada di banyak negara dan masyarakat.

Pada mulanya, konsep pembangunan berkelanjutan disusun dengan konsep dasar keberlanjutan dengan beberapa dimensi utama. Berikut merupakan bagan yang menggambarkan relasi dan dimensi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.2 Sustainable Development



(Lélé, S. M, 1991)

Berdasarkan bagan di atas, dapat terlihat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan disusun dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keterpenuhan tersebut diharapkan dapat tercapai di dalam tiga dimensi yakni secara literal, ekologis, dan sosial. Adanya pertumbuhan dan perubahan merupakan bagian dari proses untuk menciptakan kondisi yang berkelanjutan baik dalam konteks ekologis maupun sosial. Namun, dalam perkembangannya

konsep ini terus berkembang dan memiliki sektor-sektor khusus yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Perkembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan selanjutnya terjadi pada tahun 2015, dimana konsep ini kemudian disepakati dalam forum internasional di PBB. Konsep pembangunan berkelanjutan yang diadopsi, kemudian dikenal sebagai SDGs atau (Sustainable Development Goals) (Hickel, 2015). Dalam konsep yang baru ini diperkenalkan 17 klaster yang harus dicapai untuk setiap negara, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat dikatakan sebagai pembangunan yang memenuhi unsur SDGs. Berikut merupakan bagan yang memuat klaster SDGs secara lebih jelas.



(Hickel, 2015)

Beberapa klaster yang dimuat dalam SDGs tahun 2015 diantaranya adalah (1) Penghapusan kemiskinan, (2) Ketahanan pangan dan mengeliminasi kelaparan, (3) Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, (4) Pendidikan yang berkualitas, (5) Kesetaraan gender, (6) Sanitasi dan air bersih yang dapat lebih mudah diakses, (7) energi baru terbarukan yang lebih luas, (8) Penciptaan lapangan kerja dan ekonomi yang bertumbuh, (9) pembangunan infrastruktur dan inovasi, (10) Ketimpangan yang semakin rendah, (11) Komunitas dan kota

yang berkelanjutan, (12) Produksi dan konsumsi yang seimbang, (13) Penanganan atas ancaman perubahan iklim, (14) Ekosistem laut yang terjaga, (15) Ekosistem darat yang baik, (16) Perdamaian dan keadilan yang semakin merata, (17) adanya kemitraan dan kolaborasi. 17 klaster tersebut merupakan target-target yang ingin dicapai maksimal pada tahun 2030 dalam kerangka SDGs.

Konsep pembangunan berkelanjutan atau SDGs dalam penelitian ini berguna untuk menjadi salah satu objek penelitian yang dikaji. Peneliti akan berusaha memberikan sebuah deskripsi atas pembangunan berkelanjutan di Papua dan bagaimana dampaknya terhadap perdamaian. Konsep ini sangat penting karena pembangunan yang dilakukan dengan baik akan membawa perdamaian, sehingga diharapkan pada saran yang disampaikan di akhir penelitian nantinya dapat benar-benar diaplikasikan sebagai satu rencana dan evaluasi atas pembangunan yang selama ini dilakukan di Papua.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian subbab penelitian terdahulu ini akan memuat beberapa penelitian yang relevan untuk membantu analisis atas persoalan yang diajukan. Penelitian-penelitian terdahulu itu nantinya akan membantu penulis dalam rangka proses penulisan dan perolehan data awal yang dimungkinkan untuk memperkaya temuan. Selanjutnya penulis akan menjabarkan kesemua penelitian tersebut dalam satu tabel untuk memudahkan melihat relevansi dan kesamaan yang ada antara penelitian yang lalu dengan penelitian ini.

Penelitian ini akan menggunakan sejumlah enam penelitian terdahulu yang terdiri dari sepuluh jurnal penelitian. Berikut merupakan penjabaran dari penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini.

2.2.1. Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua. (Ismail, 2015).

Penelitian ini berusaha memberikan sebuah perspektif tentang pengembangan ekonomi kerakyatan di provinsi Papua. Dalam mengukur potensi pengembangan ekonomi di provinsi Papua, Ismail (2015) mengawinkan data kualitatif yang dianalisis dengan metode analisis SWOT. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang mendasar terkait dengan potensi ekonomi kerakyatan yang ada di Papua. Beberapa hal tersebut adalah adanya kelemahan struktural yang belum tercapai dalam memaksimalkan perekonomian di Papua.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka membangun Papua adalah besarnya dana otonomi khusus yang ditransfer Pemerintah Pusat, berkenaan dengan status otonomi Papua. dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, dana otsus yang sedemikian besar akan dapat dimanfaatkan demi membangun kemandirian masyarakat Papua. sebuah sisi yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya beberapa data dan perspektif mengenai pembangunan di Papua yang selama ini menjadi strategi utama pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik di Papua.

2.2.2. Perdamaian dan Pembangunan Papua: Problematika Politik Atau Ekonomi?. (Elisbeth, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth (2016) bertujuan untuk menemukan akar permasalahan yang terjadi di Papua dengan mengklasifikasikannya kedalam dua problematika utama. Penelitian ini memberikan sebuah perspektif dalam melihat konflik di Papua dan pendekatan yang selama ini diambil. Dengan melihat persoalan Papua

kedalam bingkai politik dan ekonomi, akan semakin mudah menggambarkan konflik Papua secara utuh. Penelitian ini juga memberikan sebuah data awal yang sangat berharga dalam melakukan penelitian lanjutan.

2.2.3. Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya. (Lindawaty, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Lindawaty bertujuan untuk mencari pokok persoalan yang menyebabkan konflik di Ambon. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif analisis deskriptif dalam menganalisis data yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Penelitian ini kemudian juga berusaha menemukan sebuah solusi yang dapat dipakai dalam mengamankan situasi dalam jangka waktu yang lebih permanen. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan ruang aparat keamanan untuk lebih bersifat inklusif ketimbang eksklusif yakni dengan mengandalkan usaha persuasif.

Relevansi penelitian ini terdapat pada model yang serupa dimana konflik Ambon dapat membawa perspektif yang terang dalam menjelaskan proses perdamaian. Model pembangunan perdamaian yang ada di Ambon adalah perpaduan antara Bottom-up dan Top-down. Model yang dilakukan di Ambon dapat menjadi sebuah refleksi yang bagus untuk dapat diterapkan di Papua.

2.2.4 Torture As Theatre In Papua. (Hernawan, 2016)

Peneliti dalam tulisan ini memberikan sebuah deskripsi tentang adanya kekerasan yang terjadi di Papua. Peneliti melakukan wawancara dan studi dokumen terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Papua dalam kurun waktu 1963-2010. Peneliti juga mengambil 431 responden yang memiliki hubungan dari kasus yang diteliti, baik sebagai penyintas maupun saksi mata atas kasus kekerasan yang terjadi. Peneliti mendeskripsikan temuannya kedalam empat elemen sebagai ukuran atas aksi kekerasan yang dilakukan, yakni relasi kekuasaan, teknik dominasi, aktor yang terlibat, dan motivasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, relevansi ditemukan sebagai data pendukung atas penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penulis juga dapat mengambil konteks penelitian yang dilakukan sebagai pembandingan dan penguatan atas evaluasi strategi di kemudian hari.

2.2.5 Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi (Zainal, 2016)

Zainal (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui adanya transformasi konflik dan perubahan atas relasi sosial-politik pada Provinsi Aceh pasca konflik. Perubahan relasi sosial-politik menjadi penting karena dapat memastikan dan menjadi satu indikator dalam menilai konflik yang tengah terjadi. Transformasi konflik yang dimaksud adalah perubahan jenis konflik menjadi konflik yang bernilai lebih positif dan konstruktif. Penelitian ini dapat menjadi satu perspektif tambahan dalam menilai dan memberikan gambaran pada objek yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini.

Transformasi konflik adalah perspektif yang saat ini banyak berkembang dan menjadi salah satu perspektif utama dalam menilai satu konflik yang terjadi. Oleh karena itu perspektif transformasi konflik pada konflik di Aceh dapat menjadi masukan yang berharga untuk membuat analisis tambahan yang lebih tajam pada penelitian yang akan dilakukan.

2.2.6 The Role of Civil Society in Cambodia's Peace-building Process (Dosch, 2012)

Peneliti dalam penelitian yang dilakukan di Kamboja, melakukan analisis terhadap peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan perdamaian yang berlangsung. Penelitian ini menganggap peran masyarakat sipil yang kemudian dikenal dengan pola intervensi bottom-up dapat lebih efektif untuk mengatasi jalannya konflik yang berlangsung di Kamboja. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana proses pembangunan perdamaian dapat terlaksana dan menjadikan tata masyarakat yang lebih baik pasca konflik.

2.2.7 Political skills or lying and manipulation? The choreography of the Northern Ireland peace process (Dixon, 2002)

Dixon (2002) melakukan penelitian terkait dengan adanya manipulasi dan kebohongan dalam memainkan perundingan perdamaian di Irlandia Utara. Menurut peneliti, proses perdamaian yang dilakukan di Irlandia Utara mendapatkan banyak keuntungan dari adanya unsur politik dan negosiasi secara Top-down yang baik. Selain

itu meskipun disinyalir ada sedikit manipulasi, proses perundingan damai tetap terlaksana dengan baik.

Penelitian di Irlandia Utara ini dapat menjadi satu model pembandingan dalam proses yang coba dilakukan di Papua. penelitian ini akan dipakai sebagai satu evaluasi dan bahan untuk melakukan pembandingan sehingga didapatkan metode yang cukup baik untuk diterapkan di Papua.

2.2.8 The Propaganda Of Peace: The Role Of Media And Culture In The Northern Ireland Peace Process. (McLaughlin dan Baker, 2010)

Dalam proses perundingan damai di Irlandia Utara, ditemukan oleh peneliti McLaughlin dan Baker (2010) adanya propaganda positif yang mampu menyatukan masyarakat. Propaganda tersebut mengambil peran media dan budaya untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Hasil yang didapatkan juga sangat positif, dimana perdamaian akhirnya dapat dicapai. Penelitian ini dapat menjadi satu *insight* dalam memandang propaganda pada penelitian yang akan dilakukan. Sehingga mungkin dalam pengelolaan Papua nantinya, pendekatan pembangunan yang dilakukan akan dapat diimbangi dengan persebaran nilai dan propaganda positif untuk menangkali propaganda negatif.

2.2.9 Democracy and Welfare In Hard Times: The Social Policy Of The Orbán Government In Hungary Between 2010 and 2014. (Szikra, 2014)

Peneliti dalam penelitian ini memberikan satu sudut pandang terkait kebijakan demokratisasi dan kesejahteraan yang digaungkan oleh pemerintahan Orban di Hungaria untuk mencegah adanya konflik. Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Hungaria pada waktu itu secara mengejutkan dapat berhasil dan meloloskan Hungaria dari adanya perang dan kekerasan yang berkepanjangan. Selanjutnya, dalam waktu yang singkat pula, pemerintah Hungaria berhasil membangun Hungaria dengan mereformasi berbagai bidang dan menjadikan Hungaria sebagai negara yang lebih demokratis dan sejahtera secara ekonomi dibanding masa-masa silam.

Penelitian ini dapat menjadi satu pengetahuan dalam merumuskan strategi pembangunan di Papua. keberhasilan yang diraih oleh Orban dan Hungaria merupakan satu bukti bahwa intervensi yang dilakukan dari inisiatif atas atau Top-down dapat bernilai positif apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam memandang permasalahan di Papua, pendekatan top-down juga dapat menjadi satu pilihan namun dengan beberapa catatan.

2.2.10 Peacebuilding: In Sub-saharan Africa: African Perspectives. (Ewusi, 2014)

Konflik yang terjadi di Afrika bagian Sub-Sahara merupakan konflik yang telah ada dan menahun. Banyak hal yang telah dilakukan demikian juga intervensi asing yang datang untuk melakukan proses perdamaian. Dalam hal ini Ewusi (2014) memberikan satu perspektif

dalam menjelaskan proses perdamaian yang dilakukan di Arifka Sub-Sahara. Beberapa cara yang dilakukan dalam penanganan konflik dijelaskan dengan baik dan dapat menjadi satu pengetahuan dalam membangun Papua agar dikemudian hari dapat mencapai perdamaian yang lebih positif.

Berkenaan dengan penjabaran tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan, berikut akan digambarkan matriks untuk dapat lebih menggambarkan perbedaan dan persamaan setiap penelitian agar lebih detail. Berikut merupakan penjabaran dan matriks atas penelitian terdahulu yang dipakai sebagai salah satu referensi dalam penyusunan penelitian ini.

No	Judul dan Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Jurnal					
1.	<p>Judul</p> <p>Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua.</p> <p>Peneliti</p> <p>Ismail, M. (2015).</p>	Deskriptif	Adanya pendekatan ekonomi yang menekankan ekonomi kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi di Papua.	Penelitian ini memberikan satu data pokok tentang pembangunan yang dilakukan selama ini di Papua dalam pengelolaan ekonomi.	Perspektif strategi pembangunan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya dilakukan dalam rangka melihat potensi pembangunan ekonomi. sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mencoba melakukan evaluasi terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan.
2.	<p>Judul</p> <p>Perdamaian dan Pembangunan Papua:</p>	Kualitatif Studi Kasus	Penelitian ini menemukan adanya problematika yang terjadi dalam	Penelitian ini memberikan gambaran tentang	perbedaan penelitian terdapat pada dimensi pembahasan yang

	<p>Problematika Politik Atau Ekonomi?.</p> <p>Peneliti</p> <p>Elisbeth (2016)</p>		<p>konteks pembangunan di Papua. Dimana tolak ukur persoalan yang ingin dijawab dalam konteks pembangunan masih belum jelas, dan dikaburkan dengan adanya unsur politik yang menonjol.</p>	<p>bangaimana pembangunan di Papua dilakukan dan menjawab apakah unsur perdamaian benar-benar diberikan ruang untuk berkembang.</p>	<p>terbatas hanya pada problematika pembangunan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan turut membahas propaganda yang selama ini kerap dilakukan.</p>
3.	<p>Judul</p> <p>Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya</p> <p>Peneliti</p> <p>Lindawaty, D. S. (2016).</p>	<p>Deskriptif-Analisis</p>	<p>Penelitian menunjukkan adanya faktor ketimpangan ekonomi dan provokasi yang cukup berpengaruh dalam menyulut konflik di Ambon.</p>	<p>Penelitian ini memberikan sebuah tambahan informasi dan pemodelan tentang penyebab konflik. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi sebuah model tentang</p>	<p>perbedaan penelitian terletak pada konteks konflik yang diusung. Penelitian ini menjadikan Konflik Ambon sebagai objek penelitian, sedangkan penulis mengangkat Papua</p>

				pembacaan konflik yang ada di Papua.	sebagai konflik yang akan dikaji.
4.	<p>Judul</p> <p>Torture As Theatre In Papua</p> <p>Peneliti</p> <p>Hernawan, B. (2016).</p>	Qualiative Case Study	Penelitian berusaha mengungkap adanya tindak kekerasan di Papua yang dilakukan oleh baik aparat pemerintah maupun oknum tertentu.	Adanya penggambaran kekerasan di Papua yang dibuktikan oleh peneliti, dapat menjadi masukan yang berharga dalam menyusun model pendekatan bagi Papua di kemudian hari.	Penelitian ini memiliki perbedaan pada objek kajian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hernawan (2016) memberikan fokus khusus kepada kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Sedangkan penulis akan mengambil pendekatan pembangunan dan efektifitasnya dalam menyelesaikan masalah Papua.
5.	<p>Judul</p>	Kualitatif Deskriptif	Penelitian menemukan adanya pergeseran relasi	penelitian ini sangat berguna untuk	Perbedaan penelitian terletak pada konteks

	<p>Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi</p> <p>Peneliti</p> <p>Zainal (2016)</p>		<p>sosial-politik sebagai salah satu indikator bahwa konflik telah bertransformasi dan saat ini Aceh telah menuju fase dimana perdamaian positif dapat dicapai.</p>	<p>memberikan inspirasi bahwa konflik sebesar apapun dapat diselesaikan dengan beragam cara. Keberhasilan Aceh dalam mengelola konflik inilah yang akan dijadikan penulis sebagai salah satu model dalam pengembangan strategi pembangunan di Papua.</p>	<p>konflik yang dibahas.</p>
6.	<p>Judul</p> <p>The Role of Civil Society in Cambodia's</p>	<p>Kualitatif Studi Kasus</p>	<p>Penelitian ini berusaha memberikan deskripsi peran masyarakat sipil dalam proses</p>	<p>relevansi terletak pada peace process yang sama-sama dikembangkan</p>	<p>Konteks konflik dan intervensi dalam peace process yang berbeda.</p>

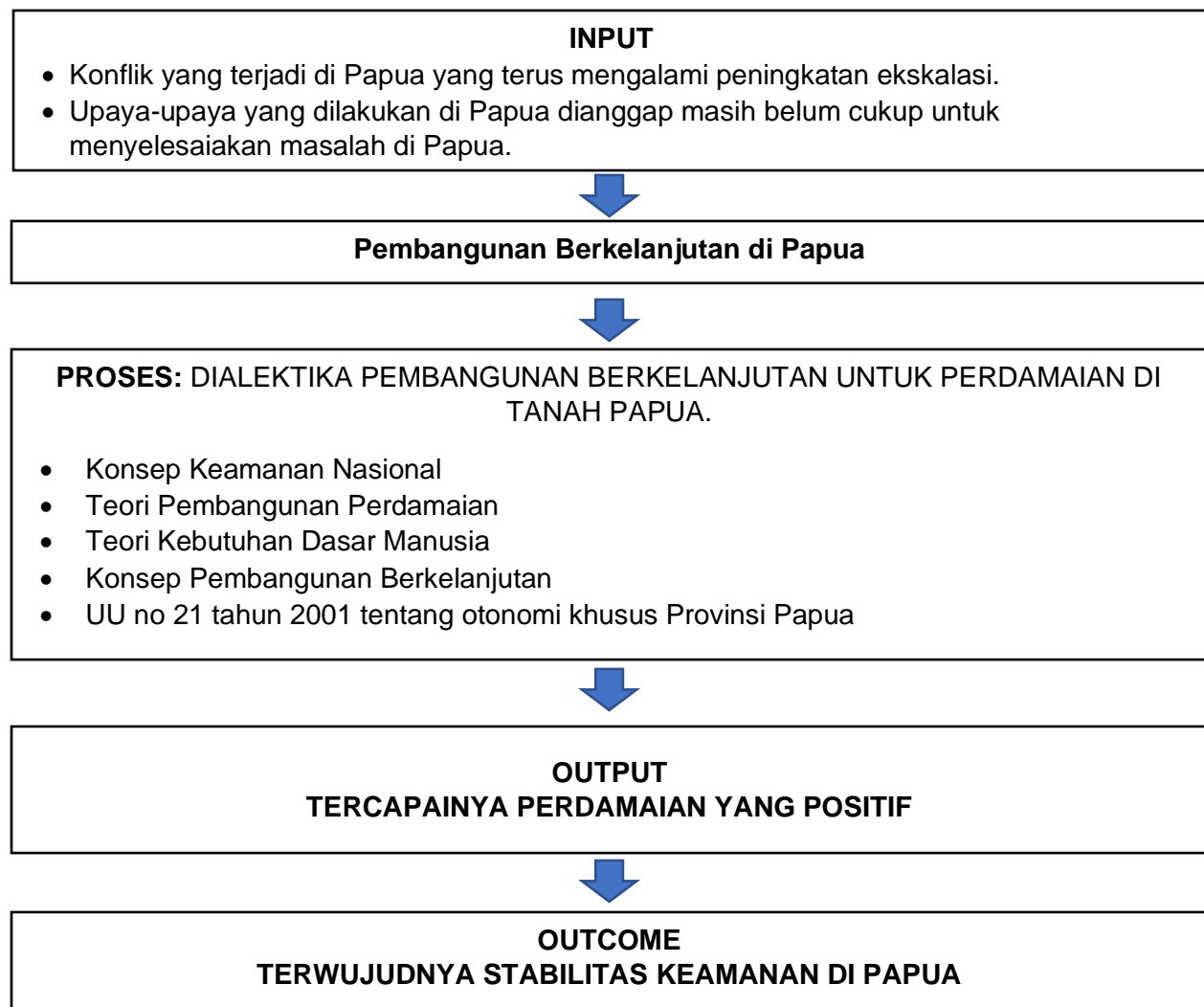
	Peace-building Process Peneliti Dosch (2012)		perdamaian yang ada di kamboja.	dalam kedua konteks konflik	
7.	Judul Political skills or lying and manipulation? The choreography of the Northern Ireland peace process Peneliti Dixon (2002)	Kualitatif Studi Kasus	Penelitian ini menemukan adanya kecenderungan unsur politik yang dominan dan manipulasi yang disinyalir ada dalam proses perdamaian di Irlandia Utara.	Relevansi yang dapat ditemukan adalah penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, sama sama mengembangkan proses pembangunan perdamaian dalam konflik.	Perbedaan terletak pada konteks dan pendekatan yang dikembangkan.
8.	Judul	Kualitatif Deskriptif	Menemukan adanya propaganda positif dalam membangun	relevansi yang dapat ditemukan adalah	Perbedaan ada pada konteks

	<p>The Propaganda Of Peace: The Role Of Media And Culture In The Northern Ireland Peace Process.</p> <p>Peneliti</p> <p>McLaughlin dan Baker (2010)</p>		<p>perdamaian yang dilakukan di Irlandia Utara.</p>	<p>pendekatan propaganda sebenarnya dapat menjadi salah satu pendekatan dalam membangun perdamaian, namun propaganda harus bersifat positif dan konstruktif.</p>	<p>penelitian yang diusung.</p>
9.	<p>Judul</p> <p>Democracy and Welfare In Hard Times: The Social Policy Of The Orbán Government In Hungary Between 2010 and 2014</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan demokratisasi dan kesejahteraan yang dilakukan oleh Presiden Orban di Hungaria mendapatkan hasil yang mengembirakan.</p>	<p>Relevansi penelitian terdapat pada pendekatan Top-down yang juga dilaksanakan oleh Orban di Hungaria. Pendekatan serupa sebenarnya</p>	<p>Perbedaan lokasi penelitian.</p>

	Peneliti Szikra (2014)		Selain itu pendekatan yang dilakukan juga dapat menghindari adanya konflik di tengah masyarakat.	dilakukan juga di Papua oleh Pemerintah Indonesia saat ini.	
10.	Judul Peacebuilding: In Sub-saharan Africa: African Perspectives. Peneliti Ewusi (2014)	Kualitatif Deskriptif	Penelitian berhasil mengambarkan beberapa macam metode pembangunan perdamaian yang dilakukan di Afrika Sub Sahara. Berdasarkan penelitian terdapat beberapa intervensi yang efektif, namun ada juga beberapa pendekatan yang ternyata gagal membawa hasil.	Relevansi penelitian terletak pada proses pembangunan pembangunan yang coba dilakukan. Kedua penelitian membawa tema peace building dengan dua tempat konflik yang berbeda.	Perbedaan terletak pada lokasi konflik yang dikaji.

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini akan mengacu kepada kerangka berfikir yang disusun dengan menyesuaikan pada beberapa proses yang akan dilalui. Penelitian ini akan menjelaskan kerangka teoritis pembangunan Papua oleh pemerintah Indonesia dalam menjawab propaganda kelompok pro kemerdekaan Papua. Kerangka berpikir ini dibagi ke dalam lima tahapan, secara berurutan yaitu Tahap Inialisasi dan Identifikasi; Tahap Pengumpulan dan Pemrosesan Data; Tahap Analisis Data; Tahap Pembahasan dan Perumusan Konsep; dan Tahap Akhir. Berikut merupakan kerangka berfikir pada penelitian ini.



Alur Fikir

**DIALEKTIKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
UNTUK PERDAMAIAN DI TANAH PAPUA**

